



Pola Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Studi pada Penerima Manfaat (KPM) melalui Kegiatan Pertemuan di Desa Suka Damai

Zulkiflimansyah¹, Ahmad Yamin²

^{1,2}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: ahmad.yamin@uts.ac.id, supriadi@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-03-27 Revised: 2023-05-22 Published: 2023-06-01	<p>This study aims to analyze the Pattern of Social Assistance in Family Hope Program (PKH) Meetings in Suka Damai Village, Manggelewa District, Dompu Regency. The research was conducted using a qualitative approach with descriptive methods. The theory used is group communication, and persuasive communication. Data collection related to Social Assistance communication patterns is carried out by approaching the elements of communication in the form of communicators, messages, media, and communicants, not to the effect element. The results showed that in general the informants applied communication patterns in meetings from the communicator aspect by reading and studying the material before holding the meeting, conveying the material in simple language, preparing the necessary media and creating a comfortable, relaxed atmosphere, and building brotherhood. the pattern of communication from the aspect of the message is done by avoiding the use of terms that are difficult for meeting participants to understand, using simple language and the language used by meeting participants on a daily basis, namely Sasak language; as well as linking the material to the social and cultural context of the meeting participants. Communication barriers experienced by social assistants in meetings in the form of process, physical, and psychological barriers. The results of this study indicate that the pattern applied by social assistants in carrying out meetings is good by considering the important things in conducting communication. Social Chaperones try to adopt interesting communication patterns.</p>
Keywords: <i>Communication Strategy</i> <i>Pattern;</i> <i>Social Companion;</i> <i>Meeting;</i> <i>PKH;</i> <i>KPM.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-03-27 Direvisi: 2023-05-22 Dipublikasi: 2023-06-01	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pola Pendamping Sosial dalam Pertemuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Suka Damai Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teori yang digunakan yaitu komunikasi kelompok, dan komunikasi persuasif. Pengumpulan data terkait pola komunikasi Pendamping Sosial dilakukan dengan pendekatan pada unsur-unsur komunikasi berupa komunikator, pesan, media, dan komunikan, tidak sampai pada unsur efek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum informan menerapkan pola komunikasi dalam pertemuan dari aspek komunikator dengan cara membaca dan mempelajari materi sebelum melaksanakan pertemuan, menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana, mempersiapkan media yang diperlukan dan menciptakan suasana yang nyaman, santai, serta membangun persaudaraan. pola komunikasi dari aspek pesan dilakukan dengan menghindari penggunaan istilah-istilah yang sulit dipahami peserta pertemuan, menggunakan bahasa sederhana dan bahasa yang digunakan peserta pertemuan sehari-hari yaitu bahasa Sasak; serta mengaitkan materi dengan konteks sosial dan budaya peserta pertemuan. Hambatan komunikasi yang dialami Pendamping Sosial dalam pertemuan berupa hambatan proses, fisik, dan psikologis. Dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pola yang diterapkan oleh Pendamping Sosial dalam melaksanakan Pertemuan sudah baik dengan mempertimbangkan hal-hal yang penting dalam melakukan komunikasi. Pendamping Sosial berupaya menerapkan pola komunikasi yang menarik.</p>
Kata kunci: <i>Pola Strategi Komunikasi;</i> <i>Pendamping Sosial;</i> <i>Pertemuan;</i> <i>PKH;</i> <i>KPM.</i>	

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan Merupakan fenomena global yang terjadi di Indonesia, kemiskinan menurut konferensi dunia untuk pembangunan sosial di Kopenhagen pada maret 1995 merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu hidup

layak. Kemiskinan dirincikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya. Oleh karenanya kemiskinan menjadi konsep yang dinamis dan konsep yang jelas berupa ketidakmampuan mengatasi kehidupan

yaitu mencukupi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan dan juga perumahan. Permasalahan kemiskinan memiliki beberapa faktor penyebab yang dilihat dari berbagai perspektif. Penyebab tersebut bergantung pada situasi dan kondisi penduduk di suatu tempat. Terkadang kebutuhan penduduk miskin di suatu tempat berbeda dengan kebutuhan penduduk miskin di tempat lainnya. Sehingga sangat sulit untuk memastikan masalah-masalah dan sebab terjadinya kemiskinan. Bahkan, beberapa program pemerintah belum berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan. PKH merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (serta negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 187) pasal 27 dan pasal 34 UUD 1945.

PKH Kabupaten Dompu dimulai tahun 2008 kemudian per Juni 2019, berdasarkan jumlah data Kabupaten Dompu tahap II 201 :314.746 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan jumlah komponen dari 314.746 KPM (ibu penerima manfaat) terdiri dari jumlah anak SD: 207 Anak. Jumlah anak SMP :10.969, Anak SMA: 77.106, Bumil: 4.920, Balita 90.659, Apras 23.698, Lansia 30.889, Disabilitas, 1.997 orang. Petugas PKH dengan struktur: Koordinator Kabupaten 1 orang, Operator Kabupaten 4 orang, pendamping PKH 42 Orang, Total SDM PKH: 47 orang. Edukasi mengenai perubahan skema bantuan disampaikan secara berjenjang kepada seluruh SDM Pelaksana PKH Kabupaten/Kota. Bahwa indeks bansos sebagai berikut:

1. Ibu Hamil /Balita = Rp. 3.000.000/Tahun
2. SD = Rp. 900.000/Tahun
3. SMP= Rp. 1.500.000/Tahun
4. SMA= Rp. 2.000.000/Tahun
5. Lansia/Disabilitas = 2.400.000/Tahun.

II. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi Penerima manfaat PKH secara mendalam dan komprehensif. Selain itu,

dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan juga permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan partisipasi Penerima Manfaat PKH.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil keluarga Penerima Manfaat PKH

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah memberikan bantuan beryarat untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia dan bagi penyandang disabilitas berat. Bantuan ini juga tidak diberikan cuma-cuma, penerima bantuan PKH harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta penerima bantuan harus memenuhi komponen yang telah ditentukan oleh pemerintah Untuk ibu hamil dalam kehamilan keempat sudah tidak termasuk dalam komponen kepesertaan. Bantuan yang diberikan kepada maksimal anggota keluargasesuai dengan komponen dan kriteria PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di Desa Suka Damai pada tahun 2017 dengan jumlah peserta 168 penerima manfaat dengan seorang pendamping PKH. Pada tahun 2018 PKH terdapat penambahan jumlah penerima. Penerima bantuan PKH mendapatkan pendampingan dan pelatihan yang cukup baik dari pendamping PKH. Pendamping PKH mengadakan pertemuan rutin kepada anggota PKH setiap satu bulan sekali. Pada Tahun 2018-2019 terjadi penambahan peserta PKH yaitu sebanyak 209 orang. Kemudian tahun 2020 menjadi 262 jumlah peserta PKH keseluruhan dan Untuk memudahkan dalam pendampingan dan pengarahan, pendamping PKH mengelompokkan peserta PKH menjadi 8 kelompok dengan jumlah kelompok yang berbeda-beda.

2. Karakteristik sumber data (Informan)

a) Jenis Kelamin

Penerima manfaat PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut pengurus keluarga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Hal ini

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bahwa rata-rata penerima PKH di Desa Suka Damai adalah ibu-ibu.

b) Usia

Bahwa informan yang berusia kurang dari 19 tahun berjumlah 2 orang. Kemudian informan yang berusia lebih dari 19-35 tahun berjumlah 2 orang. Informan yang berusia 35-45 tahun berjumlah 4 orang dan informan yang berusia lebih dari 45 tahun keatas sebanyak 5 orang.

c) Pekerjaan

Bahwa informan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga yaitusebanyak 2 orang, sedangkan untuk jumlah informan yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 4 orang. Informan yang berprofesi sebagai buruh berjumlah 3 orang, informan yang juga berprofesi sebagai petani 1 orang.

d) Tingkat pendidikan

Bahwa informan (sumber data) yang tidak tamat SD 2 orang, informan dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat sebanyak 2 orang, informan dengan tingkat pendidikan SMP/Sederajat sebanyak 3 orang, informan dengan tingkat pendidikan SMA atau Sederajat sebanyak 3 orang.

B. Pembahasan

1. Pola yang dilakukan pendamping PKH di Desa Suka Damai, Terdapat Empat pola yaitu:

a) Pola Animasi.

Pola Animasi sosial bertujuan untuk membangkitkan semangat, kekuatan dan juga kemampuan individu maupun kelompok sasaran dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam bentuk kerjasama atau suatu kegiatan bersama. Pendamping PKH harus memiliki sikap antusiasme yang tinggi dibandingkan keluarga penerima manfaat agar terlaksana kegiatan yang telah direncanakan Bersama Pendamping PKH berperan untuk memberi semangat, memberikan kekuatan, memberikan inspirasi dan motivasi kepada keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kewajiban PKH yaitu memeriksa ibu hamil, lansia dan anak balita ke layanan kesehatan dan menyekolahkan anaknya ke layanan

pendidikan. Menurut pendamping PKH, di Desa Suka Damai tersebut setiap ada pendampingan, pendamping selalu menyampaikan bahwa penerima bantuan PKH harus memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH, seperti memeriksa kesehatan baik di Posyandu maupun di Puskesmas. Hal ini juga disampaikan oleh ibu Rusliyani sebagai pendamping PKH. "Setiap kami pendampingan kami selalu menyampaikan kepada ibu-ibu yang menerima bantuan PKH untuk memeriksa kesehatannya di Posyandu baik di puskesmas dan menyekolahkan anaknya di fasilitas pendidikan".

Pendamping PKH merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan penerima bantuan PKH dan juga pihak yang menyukseskan program keluarga harapan. Oleh karena itu sebelum pendamping terjun ke lapangan untuk dapat mendampingi masyarakat yang menerima bantuan PKH, pendamping tentunya sudah dibekali ilmu pengetahuan melalui diklat pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang selanjutnya pengetahuan tersebut disampaikan kepada masyarakat yang menerima bantuan. Disamping menyampaikan informasi pendamping juga harus memotivasi penerima untuk selalu memenuhi kewajibannya juga sebagai penerima bantuan PKH. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu penerima bantuan PKH yaitu ibu krisnawati.

b) Pola Mediasi dan Negosiasi

Peran mediasi dan juga negosiasi dilakukan pendamping ketika terjadinya konflik terhadap individu maupun kelompok penerima bantuan PKH. Pendamping PKH dalam hal ini harus bersikap netral tanpa memihak pada satu individu maupun kelompok. Di pertegas Pak Najmaudin sebagai pendamping PKH. "Konflik sering terjadi pada saat pendampingan karena berbeda pemahaman sehingga menimbulkan keributan, kami mengatasinya dengan cara menjelaskan dan selanjutnya memecahkan masalah bersama tanpa memihak pada satu individu maupun kelompok".

c) Pola Pemberian Dukungan

Sering kali masyarakat tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk memaksimalkan kemampuannya, untuk itu perlu adanya dukungan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Peran pemberi dukungan ditampilkan atau muncul ketika penerima manfaat PKH anaknya sudah putus sekolah, sedangkan anak tersebut masih dalam usia sekolah sehingga untuk menerima bantuan tunai anak tersebut harussekolah maka pendamping harus memotivasi atau memberi dukungan anak tersebut untuk dapat bersekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH, pendamping PKH di Desa Suka Damai dalam hal ini sudah berperan. Di pertegas oleh salah satu penerima bantuan PKH yaitu ibu Rohana.

“Nanti Pak Pendamping PKH ada datang ke rumah kita, untuk menyampaikan anak saya jangan putus sekolah, harus tetap bersekolah. Kalau tidak bersekolah maka ia tidak mendapatkan lagi bantuan PKH karena tidak memenuhi Kriteria PKH lagi”. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Dusun Semparu yaitu Bapak Sabarudin.

d) Pola Edukasi

Meskipun pendamping Program Keluarga Harapan telah berperan dalam dalam keterampilan edukasi namun pemahaman keluarga manfaat PKH terhadap Program Keluarga Harapan itu sendiri masih rendah. Masih banyak diantara keluarga manfaat PKH yang tidak mampu menjelaskan apa itu PKH dan tujuan dari Program Keluarga Harapan. Pemahaman keluarga penerima manfaat terhadap PKH ialah bantuan pemerintah dalam bentuk uang. Ada dari keluarga penerima bantuan PKH yang tidak mengetahui apa kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH. Sehingga peran pendamping dalam hal tersebut masih kurang. Kesadaran penerima bantuan PKH akan kewajiban PKH baru dipahami oleh penerima manfaat PKH ketika terjadi pemotongan uang bantuan karena tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ketika terjadi pemotongan bantuan tunai yang disebabkan juga karena tidak terpenuhi

kewajibannya. Maka pendamping pada Program Keluarga Harapan segera melakukan kunjungan ke rumah penerima manfaat PKH, untuk menjelaskan kepada keluarga penerima PKH kenapa terjadi pemotongan sekaligus menyampaikan informasi terkait kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima bantuan PKH. Jika tidak dipenuhi maka akan berdampak kepada keluarga penerima manfaat itu sendiri

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pertemuan dengan penerima manfaat dilakukan satu kali setiap bulan guna meningkatkan kemampuan keluarga sesuai dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) yaitu: Peningkatan kemampuan keluarga penerima manfaat dilaksanakan melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kemudian pada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dilaksanakan oleh pendamping dengan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan setiap satu bulan sekali.

e) Efektivitas Pendamping

Keberadaan Pendamping menjadi penting dalam perlindungan keluarga rentan yang sebagaimana terdapat dalam program Keluarga Harapan. Pendamping Memiliki peranan sebagai jembatan akselerasi untuk keluarga agar dapat kembali pada kondisi sejahtera dan mendapatkan akses layanan sosial yang keluarga butuhkan. Pendamping sosial dalam hal ini orang yang memiliki tugas atau yang dapat dikategorikan sebagai agent of change untuk memperkuat dukungan dan juga mendayagunakan sumber daya serta potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Berdasarkan dari penjelasan tersebut sebagai seorang pendamping mampu memberikan fasilitas pendampingan yang digunakan untuk memaksimalkan sumber daya manusia agar bisa memecahkan masalah yang dihadapi.

Pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan memiliki pendamping yang terbagi di beberapa wilayah dampingan dengan Surat Perintah Tugas (SPT), sebagaimana penuturan Koordinator PKH Kabupaten Dompu saat wawan-

cara: "Kita itu cuma surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, surat tugas itu dasar suratnya dari Surat Keputusan dari Kementerian. SK keluar dari Kementerian Sosial baru ada surat tugas penempatan dari Dinas atau surat sambungan penempatan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial" (Moh Irawan SE, Wawancara, 23 Juli 2021).

Mengingat seorang pendamping menjadi salah satu dari sumber daya manusia yang memiliki peranan cukup penting dalam membantu keluarga pra-sejahtera kembali pada kondisi sejahtera, tentu pendamping memiliki tugas dalam melaksanakan tugasnya menjadi seorang pendamping pada Program Keluarga Harapan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil keputusan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga tentang Pengangkatan Pendamping Sosial PKH tahun 2021. Tugas pendamping sosial sebagai berikut:

1) Menyusun rencana kerja PKH di wilayah dampungannya

Pendamping yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dapat membantu dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan memiliki tanggungjawab utama yaitu membuat sebuah perencanaan pada kegiatan rutin bulanan maupun jadwal penyaluran bantuan sosial selama satu tahun atau selama masa kerja sebagai pendamping sosial. Menyusun rencana kerja tersebut dilakukan bersama dengan melibatkan stakeholder yang terkait agar perencanaan yang sudah disusun oleh pendamping dan dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana penuturan dari pendamping mengenai proses menyusun rencana kerja, sebagai berikut: "Perencanaan itu dilakukan seperti menyusun program selama 1 tahun terkait dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH selama dia masih menjadi peserta Program Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), nah itu kita susun rencana kerjanya bareng samadesa dan juga sama Dinas Sosial" (Najamudin, Wawancara, 08 Agustus 2021).

2) Melakukan sosialisasi kebijakan dan bisnis proses PKH.

Sosialisasi merupakan sebuah kegiatan awal yang dilakukan oleh pendamping pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Adanya sosialisasi sebagai kegiatan awal atau pertemuan awal membahas tentang keseluruhan dari Program Keluarga Harapan bersama stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan Program diantaranya ada aparat pemerintah baik pada tingkat kecamatan, desa, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dan masyarakat umum yang dilakukan secara berkala. Sebagaimana hasil dari wawancara dengan staff Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mengatakan adanya keterlibatan dalam proses sosialisasi dan proses pelaksanaan kegiatan PKH, sebagai berikut penuturannya: "Setiap mau penyaluran atau mau ada kegiatan apa kecamatan selalu dilibatkan ke Dinas Sosial itu semua rencana dirapatkan dulu. Setiap ada rapat di Dinsos atau di kelurahan kita dilibatkan walaupun cukup mengetahui oh ini mau ada penyaluran misalnya atau mau ada kegiatan lainnya" (Sahrudin Wawancara, 21 Agustus 2021).

3) Melakukan pemetaan dan fasilitasi kelompok KPM PKH.

Calon penerima program bantuan sosial salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan dilakukan berdasarkan data yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai bahan pertimbangan. Melalui data tersebut yang diusulkan dari Kelurahan atas mengetahui dari Kecamatan lalu dikoordinasikan dengan Dinas Sosial yang kemudian diusulkan kembali pada Pusat Data dan juga Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial yang kemudian munculnya hasil penetapan yang secara sah melalui hasil Keputusan Kementerian Sosial yang terbagi dalam beberapa golongan penerima bantuan salah satunya terdapat data penerima bantuan PKH, dari hasil tersebutlah baru dapat dikatakan sebagai penerima bantuan Program

Keluarga Harapan. Selanjutnya, terdapat mekanisme penetapan untuk menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan hasil dari validasi data awal kepada calon penerima manfaat PKH dan berdasarkan hasil verifikasi komitmen dan pemuktahiran data yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH. Setelah ditetapkannya penerima bantuan sosial atau yang sering disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan pemetaan peserta PKH yang dilakukan berdasarkan daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota, dan kecamatan. Penetapan wilayah paling kecil melalui satuan kecamatan yang kemudian di fokuskan kembali pada pembagian di wilayah desa. Dalam satu kelompok dampingan desa terdapat satu orang pendamping dengan peserta dampingan yang dalam hal ini dibagi kembali dalam beberapa kelompok kecil KPM untuk mempersiapkan pelaksanaan pertemuan kelompok. Keadaan lingkungan wilayah dampingan di desa dibagi berdasarkan kedekatan geografis. "Pembagian wilayah dampingan per pendamping itu taunya dari surat tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, tapi untuk pembagian kelompok dampingan itu kondisional kebutuhan bisa per RW atau perRT nah itu dibantu ketua kelompoknya yang udah dipilih buat bantu pendampingnya pas dengan dilapangan" (Najamudin, 08 Agustus 2021).

4) Melaksanakan proses bisnis PKH.

Yang meliputi validasi, penyaluran bantuan sosial, verifikasi komitmen, pemuktahiran data, pertemuan bulanan pertemuan, dan gradasi KPM. Pertemuan awal pada saat sosialisasi dilaksanakan sekaligus untuk dapat melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini keluarga sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH atau yang biasanya disebut eligible. Namun, data yang digunakan untuk dapat

melakukan validasi data kepada calon peserta KPM PKH merupakan data yang diberikan dari Kementerian Sosial sebagai bahan mentah untuk dicocokkan dengan kondisi calon penerima manfaat, sebagaimana dengan penuturan pendamping Program Keluarga Harapan Desa Suka Damai.

5) Melakukan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan program komplementer

Mendapatkan bantuan komplementer merupakan salah satu hak sebagai KPM PKH baik bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Maka dari itu seorang pendamping bertugas untuk melakukan kegiatan advokasi yang digunakan untuk melihat kebutuhan dasar lainnya yang keluarga butuhkan diluar dari bantuan PKH. Hal tersebut diper tegas dengan penuturan Koordinator PKH saat wawancara terkait dengan tugas pendamping yang bisa mengusulkan program komplementaritas untuk KPM dampingannya: "Dia bisa contoh misalnya gini di KPM tersebut rumah sudah tidak layak huni kan, tidak ada bantuan PKH nah pendamping itu berperan untuk bagaimana si rumah KPM yang tidak layak, bukan ngontrak ya tapi rumah pribadi itu bisa dibedah juga oleh pemerintah nah itu pendamping berperan disana, salah satu bentuk bantuan komplementaritas untuk KPM" (Rusliyani, Wawancara, 20 Juli 2021).

6) Melakukan pendampingan.

Melakukan Mediasi, fasilitasi, dan advokasi kepada KPM PKH dalam proses perubahan perilaku, pola pikir yang mandiri dan produktif. Proses pendampingan menjadi salah satu proses yang dinilai mampu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya dalam konteks ini adalah peserta KPM PKH. Dalam pendampingan ini berusaha untuk dapat membangun dan memberdayakan keluarga dengan melibatkan kemampuan dan sumber daya yang ada

untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan social lainnya. "Pada prinsipnya pertemuan kelompok itu perubahan perilaku KPM KPH untuk dia tidak berkaitan terus terjadi perubahan mindset, jadi teman-teman pendamping itu diwajibkan untuk melakukan kegiatan tersebut dengan tujuan menyadarkan KPM agar tidak selalu menjadi penerima atau ketergantungan kepada program" (Koorkab PKH, 03 Agustus 2021).

- 7) Menyusun dan menyerahkan laporan bulanan pelaksanaan PKH dan laporan lainnya secara berkala Setelah terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH)

Pendamping diharuskan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan PKH bersama dengan KPM yang dimana laporan tersebut juga dilaporkan dalam dua waktu yaitu laporan yang dibuat untuk setiap bulan. "Pendamping melaporkan kegiatan selama satu bulan yang meliputi seluruh kegiatan baik pertemuan kelompok kunjungan ke rumah KPM dan Rapat atau hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan PKH" (Najamudin, 21 Juli 2021).

2. Hambatan Pola Pendamping dalam Pertemuan Program Keluarga Harapan (PKH) Hambatan pola Pendamping Sosial dalam pertemuan terdapat empat hambatan pola pendamping, yaitu:

- a) Hambatan proses.

Berupa hambatan pengirim (tidak menguasai pesan yang akan disampaikan), hambatan *encoding*, hambatan media, hambatan *decoding* (komunikasikan salah mengartikan pesan), hambatan penerima (kurang pengetahuan tentang pesan), dan hambatan umpan balik. Hambatan proses yang mungkin terjadi dalam Pertemuan berdasarkan penjelasan di atas berupa hambatan media, hambatan *decoding*, hambatan penerima dan hambatan umpan balik.

- b) Hambatan umpan balik.

Dalam Pertemuan dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang materi, ditambah lagi karena tidak terbiasa mengikuti per-

temuan seperti itu. Hambatan ini bisa diatasi dengan cara menciptakan suasana kelompok yang menarik melalui permainan-permainan, tugas kelompok, dan latihan/ praktek. Seluruh peserta diupayakan terlibat secara aktif sehingga ada komunikasi interaktif antara Pendamping dengan peserta, juga antara peserta dengan peserta. Dampaknya adalah terciptanya hubungan yang baik dan keinginan untuk berekspresi secara bebas. Seiring dengan berjalannya waktu, peserta akan merasa senang dan tertarik, bahkan merasa rugi apabila tidak mengikuti pertemuan.

- c) Hambatan Tingkat pendidikan.

Faktor yang dapat mengurangi hambatan pendidikan rendah di Suka Damai Kec. Manggelewa Kab. Dompu yaitu pengalaman. Walaupun KPM PKH secara akademik berpendidikan rendah, bukan berarti mereka sama sekali tidak pernah mendengar atau tidak mengetahuinya. Pengalaman hidup merupakan pelajaran yang sangat berharga, dimiliki peserta PKH yang sangat berkaitan dengan kehidupan mereka. Hanya mungkin di antara mereka sudah ada yang lanjut usia sehingga merasa hal itu bukanlah sesuatu yang penting untuk dipelajari. Jika hal ini terjadi maka kejenuhan atau kurang tertarik akan dialami peserta. Pendamping Sosial mengatasi persoalan ini dengan cara meminta mereka untuk menceritakan pengalaman pribadinya. Situasi seperti ini dialami oleh informan 1 (Najamudin). Peserta yang dianggap berhasil menerapkan materi yang dipelajari diminta untuk menceritakan pengalamannya. Misalnya, materi tentang "menjadi orang tua yang baik", peserta yang dianggap berhasil mengasuh dan mendidik anak kemudian diminta untuk berbagi pengalaman. Pola ini sangat berguna untuk memperkuat materi yang dipelajari. Rusliyani (Informan 2) juga mengalaminya, dimana peserta lanjut usia kurang tertarik ketika mengikuti materi tentang ibu hamil. Relevansi materi dengan kehidupan pribadi peserta berdampak pada minat belajar peserta

- d) Hambatan psikologis.

Hambatan psikologis yang terjadi dalam Pertemuan karena beberapa hal

yaitu: pengalaman, psikologis, dan emosi (merasa bermusuhan, marah, benci, cemas, tersinggung, takut, dan sebagainya).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil Analisis yang peneliti lakukan tentang Pola Pendamping PKH Dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin Melalui kegiatan pertemuan Kelompok Desa Suka Damai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan berbagai pola pendekatan, instrumen, dan analisis disertai teori-teori yang dianggap peneliti paling relevan dalam penelitiannya yang diangkat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), dalam melakukan pendampingan di Desa Suka Damai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Dengan menitikberatkan pada tujuan utama yaitu untuk mengubah perspektif, pola pikir, serta membangun kesadaran peserta KPM terkait pentingnya Kegiatan pertemuan. Dengan begitu keterikatan dan relasi antara pendamping PKH dengan peserta KPM akan terjalin baik, pelaksanaanpun dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan (konduktivitas).
2. Upaya yang dilakukan Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), yaitu melakukan pendampingan kepada peserta KPM dan membentuk Kegiatan pertemuan kelompok setiap 1 bulan sekali untuk menjalin silaturahmi, kedekatan, keakraban. Hal ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada semua peserta KPM. Selain itu dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan bahwa pendamping PKH di Desa Suka Damai, Kec. Manggelewa, Kabupaten Dompu untuk terus membuat perubahan dan terobosan agar masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan pertemuan kelompok setiap 1 bulan sekali dan mengubah perilaku masyarakat yang kurang dalam pengetahuan dan ilmu luar. Hal ini berupaya untuk dapat membangun dan menciptakan kesejahteraan di masyarakat.
2. Peneliti menyarankan kepada masyarakat KPM Desa Suka Damai, Kec. Manggelewa,

Kabupaten Dompu untuk aktif dan antusias serta bertoleransi tinggi dalam kegiatan pertemuan kelompok seperti dalam berpendapat, mengusulkan serta bertanya Musyawarah dalam pengambilan keputusan adalah jalan yang baik untuk sebuah perubahan. "Share and Care" juga penting dilakukan peserta KPM terhadap pengalaman hidupnya. harus adanya feedback antara pendamping dan peserta KPM oleh karenanya harus menjalin dan menciptakan kedekatan di antara keduanya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambarwati, Muji Sulistyowati. 2014. Hubungan antara Niat Peserta dengan Implementasi Komitmen Program Keluarga Harapan Komponen Kesehatan. *Jurnal Promkes* Vol. 2 No. 1. Juli 2014 hlm. 1-14
- Annur, Reza Attabiurrobbi. 2013. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2013. *EDAJ* 2 (3) hlm: 409-426
- Ansori, Sonni. 2010. Evaluasi Progra Keluarga Harapan (Perbandingan di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat dan Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2009).
- Ansori, Sonni. 2010. Evaluasi Program Keluarga Harapan (Perbandingan di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat dan Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2009).
- Anthony. 2006. From Fome Zero to Bolsa Familia: Social Policies and Poverty Alleviation under Lula *Journal of Latin American Studies* 38 (4) pp: 689- 709)
- Apando. Firdaus dan N Elfemi 2014. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2014)
- Aries, Muhammad. Hardinsyah dan H Tuhiman. 2012. Determinan Gizi Kurang dan Stunting Anak Umur 0-36 bulan Berdasarkan Data Program Keluarga Harapan (PKH) 2007. *Jurnal Gizi dan Pangan* Vol. 7 (1) Maret 2012 hlm.19-26

- Fauzan, Almanshur dan Ghony Djunaidi. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media Hall,
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya Harniati. 2010. *Tipologi Kemiskinan dan Kerentanan berbasis Agroekosistem dan Implikasinya pada Kebijakan Pengurangan Kemiskinan*. (<http://www.repository.ipb.ac.id/>)
- Kamaluddin, 2004. *Studi Kelayakan Bisnis*. Malang: DIOMA
- Megawati Simanjuntak, Herien Puspitawati, dan MD Djamaludin. "Karakteristik Demografi, Sosial, dan Ekonomi Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)", *Jur, Ilm, Kel. & Kons*, Vol. 3 No. 2 (2010), ISSN: 1907 – 6037
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10/Permensos/2018/Program Keluarga Harapan